

## REKAP 1: K/L

## RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

## TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2. VISI : Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
3. MISI : 1. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan Hakim yang bersih, jujur dan profesional.  
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.  
3. Menegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.  
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.  
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

## 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2020 (RIBU)
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	2.500.000,0
Total		2.500.000,0

## 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas		3.212.861,0
01.01	Persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial Mencapai 100% Pada Tahun 2019.	100	
02	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim		2.202.825,0
02.01	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mencapai 2% per Tahun.	2	
03	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang Atau Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim		450.000,0
03.03	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Mencapai 100% Setiap Tahun	100	
04	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim		9.885.244,0
04.04	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mencapai 5% per Tahun	5	
05	Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim		739.740,0
05.05	Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Mencapai Skor 60 pada Tahun 2019	60	
06	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien		85.984.870,0

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
06.06	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai 85%	85	
Total			102.475.540,0

## 6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2021	2022	2023
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	85.984.870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.984.870,0	86.984.870,0	87.134.870,0	87.134.870,0
100.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	16.490.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.490.670,0	40.223.101,0	40.637.301,0	41.103.301,0
Total		102.475.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102.475.540,0	127.207.971,0	127.772.171,0	128.238.171,0

Jakarta, 28 Agustus 2020

Plt. Sekretaris Jenderal

ttd

R. Adha Pamekas

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 06 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2020 (RIBU)
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	2.500.000,0
05.03	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	2.500.000,0
Total		2.500.000,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Diterapkannya Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		85.984.870,0
01.01	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Nilai 100	100	
01.02	Mencapai Opini WTP BPK	WTP	
01.03	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Publik KY Mencapai Predikat Baik, Nilai 3,5 (Dari Skala 4) Pada Tahun 2019	4	
01.04	Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) Terhadap Kinerja KY Mencapai Angka 4 (Dari Skala 5) Pada Tahun 2019	5	
01.05	Skor LAKIP Mencapai Nilai B	B	
Total			85.984.870,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Output Internal Unit Eselon I	85.984.870,0
01.01	Jumlah Layanan Internal	
Total		85.984.870,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2021	2022	2023
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	74.721.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.721.277,0	74.721.277,0	74.721.277,0	74.721.277,0
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	7.032.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.032.992,0	7.032.992,0	7.032.992,0	7.032.992,0
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	4.230.601,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.230.601,0	5.230.601,0	5.380.601,0	5.380.601,0
Total		85.984.870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.984.870,0	86.984.870,0	87.134.870,0	87.134.870,0

Jakarta, 28 Agustus 2020

Plt. Sekretaris Jenderal

ttd

R. Adha Pamekas

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas  
 02 - Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim  
 03 - Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang Atau Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim  
 04 - Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  
 05 - Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim
3. PROGRAM : Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2020 (RIBU)
	Total	0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Terpenuhinya Jumlah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial.		3.212.861,0
01.01	Presentase Pemenuhan Jumlah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, Mencapai 100%	100	
02	Meningkatnya Kompetensi, Integritas dan Kesejahteraan Hakim		2.202.825,0
02.01	Persentase Peningkatan Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Hakim Mencapai 2% Per Tahun	2	
02.02	Presentase Pemenuhan Jaminan Keamanan dan Kesehatan Hakim Mencapai 100% Pada Tahun 2019	100	
03	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain		450.000,0
03.01	Persentase Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Secara Tepat Waktu Mencapai 100%	100	
04	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perilaku Hakim		9.885.244,0
04.01	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Mencapai 15% Setiap Tahun	15	
05	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim		739.740,0
05.01	Persentase Penurunan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di 6 Wilayah Indonesia Mencapai 5% Setiap Tahun	5	
	Total		16.490.670,0

## 6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Usul Rekomendasi Rekrutmen, Peningkatan Kesejahteraan, Advokasi, Pengawasan Perilaku Serta Peningkatan Kapasitas Hakim Agung dan Hakim	16.490.670,0
01.01	Jumlah Usul Rekomendasi Rekrutmen, Peningkatan Kesejahteraan, Advokasi, Pengawasan Perilaku Serta Peningkatan Kapasitas Hakim Agung dan Hakim	
01.02	Jumlah Hakim Yang Mengikuti Pelatihan KEPPH	
Total		16.490.670,0

## 7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2021	2022	2023
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	3.277.398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.277.398,0	9.178.670,0	9.342.870,0	9.537.870,0
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	7.220.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.220.707,0	16.073.323,0	16.173.323,0	16.273.323,0
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	5.992.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.992.565,0	14.971.108,0	15.121.108,0	15.292.108,0
Total		16.490.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.490.670,0	40.223.101,0	40.637.301,0	41.103.301,0

Jakarta, 28 Agustus 2020

Plt. Sekretaris Jenderal

ttd

R. Adha Pamekas